



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**UNIT KERJA** : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ILHAM MALIK  
2. Jabatan : FUNGSIONAL AHLI MADYA  
3. NHK : 881756

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>370.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000		
2. Tanah Seluas 652 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
3. Tanah Seluas 2.032 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>133.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA AVANSA MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI RU 120 (SATRIA) Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, HONDA SUPR 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.690.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.064.686</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>555.754.686</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>476.721.670</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>79.033.016</b>



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.